

**KEBIJAKAN RATIFIKASI PERJANJIAN LINGKUNGAN  
BERBASIS HAM “ESCAZÚ AGREEMENT” OLEH  
KOSTA RIKA PADA TAHUN 2018-2024**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*

**Oleh :**

**THORIQ GIFFAN ADITYA**

**2110852011**



**Dosen Pembimbing:**

**Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si**

**Rifki Dermawan S.Hum, M.Sc**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

## ABSTRAK

Perjanjian Escazú merupakan instrumen regional pertama di Amerika Latin dan Karibia yang mengikat secara hukum untuk menjamin akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik, keadilan lingkungan, dan perlindungan terhadap pembela lingkungan. Meskipun memiliki reputasi sebagai pemimpin isu lingkungan dan sebagai salah satu arsitektur utama dari perjanjian ini, Kosta Rika justru memilih untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut dan pada akhirnya dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis alasan yang mendasari kebijakan Kosta Rika untuk menolak ratifikasi sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian menggunakan teori *two-level games* dari Robert D. Putnam yang menganalisis interaksi antara tekanan internasional dan dinamika domestik, dengan fokus pada konsep *win-set* sebagai ruang kemungkinan ratifikasi di tingkat domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-eksplanatif berbasis data sekunder. Studi ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap keluaran kebijakan ini. Pertama, asimetri kekuasaan antara koalisi pendukung dan penentang ratifikasi, di mana kamar dagang dan bisnis berhasil mendominasi narasi anti-ratifikasi, memengaruhi preferensi partai di Majelis Legislatif, serta memberikan tekanan terhadap proses legislasi. Kedua, hambatan institusional seperti fragmentasi legislatif, ambiguitas prosedural yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi, dan keterlibatan yang minim dari cabang eksekutif. Ketiga, strategi negosiasi yang tidak efektif dari negosiator dalam menyelaraskan isi perjanjian dan tekanan internasional dengan aktor-aktor kunci di domestik selama masa pemerintahan Presiden Alvarado Quesada, yang kemudian diikuti oleh penolakan secara terbuka terhadap perjanjian ini di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Chaves.

**Kata Kunci:** Perjanjian Escazú, Kosta Rika, ratifikasi, penolakan, *two-level games*

## **ABSTRACT**

*The Escazú Agreement is the first legally binding regional treaty in Latin America and the Caribbean that guarantees access to environmental information, public participation, environmental justice, and the protection of environmental defenders. Despite its longstanding reputation as an environmental leader and one of the main architect of the agreement, Costa Rica chose not to ratify the treaty and ultimately rejected it. This study analyze the underlying reasons behind Costa Rica's policy decision to reject ratification from the signing of the agreement in 2018 through 2024. To address this issue, the research applies Robert D. Putnam's two-level games theory, which examines the interaction between international pressures and domestic dynamics, focusing on the concept of the win-set as the range of possible ratification outcomes at the domestic level. The study adopts a qualitative method with an analytical-explanatory approach based on secondary data. It identifies three primary reasons contributing to this policy outcome. First, a power asymmetry between pro- and anti-ratification coalitions, with business and trade chambers successfully shaping the opposition narrative, influencing party preferences in the Legislative Assembly, and pressuring legislative processes. Second, institutional constraints such as legislative fragmentation, procedural ambiguities raised by the Constitutional Court, and minimal engagement from the executive branch. Third, an ineffective strategy by negotiators to align the agreement's content and international pressure with key domestic stakeholders during President Alvarado Quesada's administration, followed by outright rejection of the agreement under President Rodrigo Chaves.*

**Keywords:** *Escazú Agreement, Costa Rica, ratification, rejection, two-level games*

